PERPUSTAKAAN KHUSUS
SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG
No. Daft.
Tanggal

Katalog BPS: 3201002.3325

Katalog BPS : 3201002.3325
No. Publikasi : 33255.1104
Ukuran Buku : 8,5 x 11 Inchi
Jumlah Halaman : vii + 48

Naskah :
BPS Kabupaten Batang
Penyunting:
BPS Kabupaten Batang
Gambar kulit:
BPS Kabupaten Batang

PEMERATAAN PENDAPATAN KABUPATEN BATANG 2010

Diterbitkan oleh:
BPS Kabupaten Batang
Kerjasama dengan
BAPPEDA Kabupaten Batang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya Buku "PEMERATAAN PENDAPATAN KABUPATEN BATANG 2010" telah diterbitkan.

Publikasi Pemerataan Pendapatan Kabupaten Batang 2010 ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemerataan atau distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Batang Tahun 2010, dengan adanya pemerataan akan mengurangi kesenjangan antara kelompok berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batang, Oktober 2011

Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG

Sekretaris,

PUTUT HUSAMADIMAN, SE.
Pembina
NIP. 19580111 198511 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya penyusunan buku **"Pemerataan Pendapatan Kabupaten Batang 2010"** dapat diselesaikan.

Publikasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk melihat apakah hasil-hasil pembangunan telah dapat dinikmati secara merata. Perbedaan wilayah dan sektor ekonomi sangat berpotensi dalam ketidak-merataan hasil-hasil pembangunan.

Sangat disadari publikasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran guna perbaikan ke depan kami terima dengan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Batang, Oktober 2011

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG,

Drs. HERU PRASETYO
NIP. 19641021 199102 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Sistematika Penulisan 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 4

2.1. Landasan Teori 4

2.1.1. Teori *Pareto* 4

2.1.2. Teori *Gibrat* 5

2.1.3. Teori *Kuznets* 6

2.1.4. Teori *Theil* 6

2.1.5. Teori *Gini Ratio* 7

2.1.6. Kriteria Bank Dunia 9

2.1.7. Teori *Oshima* 10

2.2. Penelitian Sebelumnya 10

BAB III. METODOLOGI 12
3.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data 12
3.2. Metode Pengumpulan Data 12
3.3 Konsep dan Definisi 12
3.4. Pengolahan Data 14
3.5. Teknik Analisis 14
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG 16
4.1. Keadaan Geografis 16
4.2. Kependudukan 16
4.3. Kondisi Perekonomian 18
BAB V. SUMBER PENGHASILAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK . 20
5.1. Sumber Penghasilan Rumah Tangga 20
5.2. Rata-rata Pengeluaran 22
5.3. Pola Konsumsi Penduduk 22
5.3.1. Pola Konsumsi Makanan 25
5.3.2. Pola Konsumsi Non Makanan 27
BAB VI. DISTRIBUSI PENDAPATAN 29
6.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 29
6.1.1. Berdasarkan Gini Ratio..... 29
6.1.2. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 30
6.1.3. Ketimpangan antara Perkotaan dan Perdesaan 31
6.2. Perkembangan Distribusi Pendapatan (*Gini Ratio*) 32
BAB VII. PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Tenaga Kerja menurut Sektor di Kabupaten Batang, 2008 - 2010 18

Tabel 2. Nilai Gini Ratio dan Rata-rata Pengeluaran per kapita di Kabupaten Batang, 2009 - 2010 29

Tabel 3. Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Batang, 2009 - 2010 30

Tabel 4. Nilai Ketimpangan Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia menurut Status Daerah di Kabupaten Batang, 2010 32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kurva *Lorenz* 8

Grafik 2. Persentase Tenaga Kerja menurut Sektor di Kab. Batang, 2010..... 17

Grafik 3. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga menurut Sumber Penghasilan Utama di Kabupaten Batang, 2010 20

Grafik 4. Kontribusi Sektor terhadap PDRB dan Persentase Rumah Tangga Sektoral di Kabupaten Batang, 2010 21

Grafik 5. Persentase Penggunaan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Batang, 2010 23

Grafik 6. Persentase Konsumsi Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Batang, 2010 24

Grafik 7. Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Batang, 2010 26

Grafik 8. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Penduduk Kabupaten Batang, 2010 27

Grafik 9. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, 2004 - 2010 33

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah dan tujuan pembangunan nasional mengisyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dinikmati **merata** oleh seluruh rakyat sesuai dengan nilai darma bhaktinya. Dengan demikian tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga harus diikuti dengan aspek pemerataan, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi.

Kesenjangan pendapatan disebabkan antara lain: laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah, laju pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja menurut sektor ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan sebagainya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan harus terpadu baik antar sektor maupun antar wilayah terutama wilayah pedesaan.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Batang tahun 2010 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,72% sedangkan tahun 2010 meningkat sampai 4,97%. Selama kurun lima tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, walaupun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah yang masing-masing mencapai 5,73% dan 5,34%. Kondisi ini diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukan melalui besarnya nilai pendapatan per kapita. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Batang secara riil sudah membaik, yaitu antara 3 sampai 4,5 persen setiap tahunnya. Secara riil pada tahun 2006 pendapatan per kapita penduduk

Kabupaten Batang sebesar Rp 2,5 Juta per tahun dan pada tahun 2010 telah mencapai Rp 2,9 Juta per tahun.

Beberapa hal yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana hasil pembangunan di Kabupaten Batang telah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mengangkat harkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih baik, dan memperkecil celah antara kelompok yang berpenghasilan tingga dan rendah? Bagaimana pola konsumsi masyarakat sebagai refleksi ada tidaknya pergeseran tingkat kesejahteraan rakyat? Oleh karena itu perlu diperoleh informasi terkait dengan hal tersebut. Penyusunan publikasi ini sebagai salah satu upaya menggambarkan kondisi pemerataan pendapatan dan pola konsumsi penduduk di Kabupaten Batang.

Pemerataan pendapatan masyarakat sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, akan tetapi penelitian mengenai hal tersebut sangat penting. Hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan apakah hasil pembangunan telah dinikmati oleh semua golongan.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemerataan pendapatan dan pola konsumsi penduduk di Kabupaten Batang pada tahun 2010. Series data dari series publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi distribusi pendapatan di Kabupaten Batang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana program pembangunan di Kabupaten Batang diharapkan dapat menyusun program yang mampu menjembatani disparitas pendapatan penduduk.

1.3 Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 6 (enam) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi penjelasan beberapa teori tentang distribusi pendapatan.

BAB III METODOLOGI, mencakup ruang lingkup dan sumber data, metode pengumpulan data, konsep dan definisi, pengolahan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG, berisi keadaan geografis, kependudukan, ketenagakerjaan serta kondisi perekonomian.

BAB V SUMBER PENGHASILAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK, berisi uraian tentang sumber penghasilan dan rata-rata pengeluaran rumah tangga serta pola konsumsi penduduk.

BAB VI DISTRIBUSI PENDAPATAN, berisi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dan perkembangan gini ratio Kabupaten Batang.

BAB VII PENUTUP, berisi kesimpulan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pembangunan selalu diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini akan tergambarkan dalam peningkatan nilai PDRB. Dengan peningkatan PDRB diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali hal ini tidak sejalan. Berapa besar hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati masyarakat dapat dihitung dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB di suatu wilayah jika di kurangi dengan penyusutan dan pajak tak langsung akan diperoleh pendapatan regional. Pada hakekatnya pendapatan regional merupakan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang berupa upah / gaji, sewa tanah, keuntungan dan bunga atas modal.

Pendapatan regional dapat diumpamakan sebagai "kue". Manakala kue ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya jika pembagian kue tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan tersebut telah muncul beberapa teori maupun ukuran yang digunakan, antara lain :

2.1.1 Teori Pareto

Dengan memperhatikan adanya hubungan yang erat antara tingkat pendapatan tertentu dengan jumlah orang yang menerima pendapatan tersebut, *V.PARETO* membuat persamaan :

$$N = \frac{K}{X^{\alpha}}$$

N = Jumlah individu / keluarga yang memperoleh pendapatan

K = Konstanta (Koefisien Pareto)

X = Tingkat pendapatan tertentu dari keluarga atau individu yang bersangkutan

α = Konstanta

Indeks Pareto ini tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Hal ini dapat dilihat dari data empiris melalui persamaan logaritma yang menggambarkan bahwa kelompok individu/keluarga yang berpenghasilan rendah akan menjauhi kurva Pareto ini.

Dalam bentuk logaritma, hubungan tersebut menjadi:

$$\text{Log } N = \text{Log } k - \alpha \text{ Log } x$$

Persamaan ini sering disebut hukum Pareto yang didefinisikan: "jumlah keluarga atau individu yang setidak-tidaknya dengan pendapatan sejumlah tertentu akan berkurang dengan persentase yang tetap bila sekiranya tingkat pendapatan tersebut bertambah 1 persen." Hal ini dapat diartikan juga jika pendapatan naik 1 (satu) persen maka jumlah keluarga atau individu yang memperoleh pendapatan tersebut akan turun sebesar α.

2.1.2 Teori Gibrat

Melalui eksperimennya, *R. GIBRAT* menentukan bahwa penyebaran pembagian pendapatan akan mengikuti distribusi normal jika sekiranya pendapatan yang diterima seorang itu dapat dibagi-bagi menurut faktor penyebarannya.
Untuk itu, ukuran ketimpangan pembagian pendapatan yang dikenalkan olah Gibrat mengikuti rumusan :

$$C = \frac{100}{b} \quad ; \quad b = \frac{1}{2SL}$$

b = Konstanta

C = Ukuran ketimpangan pendapatan

SL = Standard deviasi logaritma

2.1.3 Teori Kuznets

Indeks kepincangan pendapatan yang dibuat *SIMON KUZNETS* didasarkan pada selisih absolut atau persentase bagian jumlah pendapatan dengan bagian jumlah keluarga atau individu dalam seluruh kelas pendapatan.

Rumus Indeks Kuznets adalah :

$$IK = \sum_{i=1}^{n} (P_i - Q_i)$$

P_i = Persentase jumlah pendapatan dalam kelas ke-i

Q_i = Persentase jumlah keluarga/individu kelas ke-i

N = Jumlah kelas

IK = Indeks Kuznets

2.1.4 Teori Theil

Ukuran kepincangan pembagian pendapatan yang dikemukan *M.THEIL* berupa persamaan :

$$IT = \sum Q_i \log h\, Q_i$$

IT = Indeks Theil

h = Jumlah keluarga

Q_i = jumlah persentase pendapatan yang diperoleh keluarga/individu ke-i

Nilai T berkisar antara 0 dan log h. Makin besar nilai T akan bertambah pincang pembagian pendapatan keluarga atau individu tersebut. Nilai T sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah keluarga atau individu.

2.1.5 Teori Gini Ratio

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini Ratio dikemukakan oleh *C.GINI* yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukan ketimpangan yang tinggi.

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-(i-1)

k = Banyaknya kelas pendapatan

Besarnya Gini Ratio dapat pula diperkirakan dengan bantuan Kurva Lorenz yaitu dengan membagi luas kurva yang diarsir dengan kurva segitiga OAB (lihat **Grafik 1**). Acuan ketimpangan distribusi pendapatan adalah jauh dekatnya kurva dengan segitiga OAB, semakin dekat kurva dengan segitiga OAB semakin besar nilai Gini Ratio, berarti distribusi pendapatan makin tidak merata. Sebaliknya makin dekat kurva dengan garis diagonal OB maka distribusi pendapatan makin merata.

Grafik 1: Kurva Lorenz

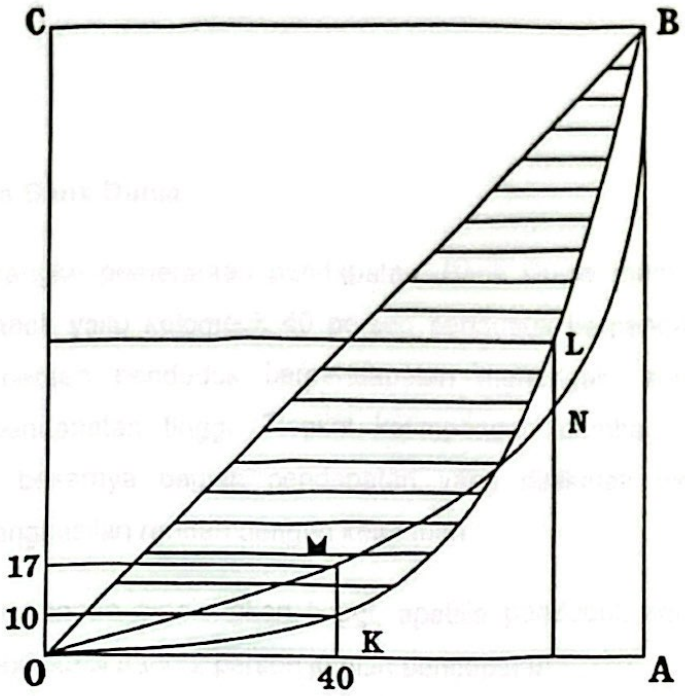

Keterangan :

- Sumbu OA menyatakan persentase jumlah penduduk.
- Sumbu OC menyatakan persentase pendapatan.

Titik K pada kurva OKLB menunjukan 40 persen jumlah penduduk menerima pendapatan sebesar 10 persen total pendapatan. Sedang titik M pada kurva OMNB menggambarkan bahwa 40 persen jumlah penduduk menerima bagian pendapatan sebesar 17 persen dari total pendapatan. Berarti distribusi pendapatan yang digambarkan oleh kurva OMNB lebih merata daripada distribusi pendapatan yang ditunjukan oleh kurva OKLB.

Kelemahan Gini Ratio menurut Sigit (1980) adalah besarnya nilai gini ratio tidak bisa menjelaskan letak ketimpangannya. Penjelasan ini dapat diilustrasikan dengan membuat kurva OMNB yang nilai Gini Rationya dibuat sama dengan kurva OKLB. Dalam kurva (yang diarsir) golongan bawah lebih menderita dibandingkan kurva OMNB karena persentase yang diterima oleh 40 persen penduduk hanya 10 persen pendapatan, sedang pada kurva OKLB 40 persen penduduk menerima bagian 17 persen dari total pendapatan. Untuk mengatasi kelemahan ini para pakar menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi dengan ukuran lain seperti kriteria Bank Dunia, sehingga diketahui keadaan penduduk kelas bawah atau kelas atas yang timpang.

2.1.6 Kriteria Bank Dunia

Dalam rangka pemerataan pendapatan, Bank Dunia membagi penduduk atas tiga kelompok yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, serta 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah dengan ketentuan :

1. Tingkat ketimpangan digolongkan tinggi, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah pendapatan.
2. Tingkat ketimpangan dikategorikan sedang, apabila penduduk kelompok rendah menerima antara 12 – 17 persen dari jumlah pendapatan.
3. Tingkat ketimpangan dikatakan rendah, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan.

Ukuran ini tidak bersifat menyeluruh karena hanya memperhatikan perkembangan pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan terendah yang didapat dengan menjumlahkan 4 decile yang pertama.

2.1.7 Teori Oshima

Harry T. Oshima beranggapan bahwa koefisien Gini terlalu memperhatikan golongan berpendapatan rendah dan tinggi, kurang melihat tingkat pendapatan sedang melalui proses kumulatif. OSHIMA memberikan rumusan yang lain yaitu:

$$O_i = \frac{\sum_{i=1}^{10} D_i - 10}{180}$$

O_i = Indeks Oshima

D_i = Persentase jumlah pendapatan dalam decile ke-i.

Oshima mengatakan bila seluruh keluarga atau individu memperoleh pendapatan yang sama maka dalam setiap decilem akan diperoleh 10 persen dari jumlah pendapatan. Bila tidak demikian maka ada kepincangan dalam pembagian pendapatan. Menurut Mc. Cleary dan Mangahas mengemukakan bahwa indeks Oshima hanya sensitif pada kelas pendapatan menengah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Sejumlah studi empirik berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dari berbagai tinjauan. Beberapa studi menyampaikan beberapa variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan seperti inflasi dan pengangguran menurut studi Mocan (1999) dan Blejer dan Guererro (1990). Sementara itu studi lain menunjukkan pengaruh kebijakan fiskal terutama tingkat pajak juga berpengaruh terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan menurut Auten dan Carroll (1999) serta Feenberg dan Poterba (1993). Beberapa studi empirik berfokus pada hipotesis kurva U terbalik Kuznets, antara lain Mushinski (2001) dan Thornton (2001) yang menguji hubungan antara ketidakmerataan distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan yang didukung oleh hasil penelitian. Malinen (2007) menguji pengaruh ketimpangan terhadap pertumbuhan tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti pendapat Kuznets.

Sejumlah studi empirik lain secara spesifik menguji faktor lain seperti faktor ekonomi dan institusional dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, antara lain oleh Li *et al.* (2000) yang menguji pengaruh korupsi terhadap distribusi pendapatan, Tanninen (1999) menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan serta Bourgignon dan Morrison (1998) menguji pengaruh dualisme terutama hubungannya dengan pertanian terhadap distribusi pendapatan. Beberapa penelitian lebih lanjut menguji kombinasi faktor-faktor tersebut seperti pengeluaran pemerintah, tingkat pembangunan dan sebagainya dilakukan oleh Deininger dan Squire (1998), Vanhoudt (2000), dan Barro (2000).

Sementara itu penelitian yang menyangkut pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di daerah di Indonesia antara lain di Kutai Kartanegara oleh BPS (2005) yang menemukan koefisien Gini sebesar 0,31. Koefisien Gini ini mengindikasikan ketimpangan distribusi yang cukup rendah. Hal ini didukung dengan keberhasilan kebijakan dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten tersebut. Penelitian lain khususnya di Kabupaten Banyumas pernah dilakukan oleh Suroso dkk (2005) yang menemukan ketimpangan distribusi pendapatan di Banyumas tahun 2005 dengan koefisien Gini sebesar 0,432. Koefisien Gini tersebut mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar. Hasil ini juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat dibanding keadaan sebelumnya. Dibandingkankan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Kabupaten Banyumas yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah menujukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif tinggi.

BAB III
METODOLOGI

BAB III
METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Distribusi pendapatan penduduk 2010 dihitung berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi tahun 2010. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Batang dengan sampel rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah sampel mencapai 672 rumah tangga.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan Blok Sensus (BS) terpilih, mendaftar *(listing)* seluruh rumah tangga yang berada pada BS terpilih, selanjutnya menentukan rumah tangga sampel terpilih untuk dilakukan wawancara. Setiap desa/kelurahan terbagi habis menjadi beberapa blok sensus. Setiap BS dapat terdiri dari 1 (satu) Satuan Lingkungan Setempat/SLS (di Kabupaten Batang dikenal dengan Rukun Tetangga / RT) atau gabungan beberapa SLS. Dalam memilih BS digunakan metode sampling *Purposive Proportional to Size (PPS)* sedangkan untuk menentukan rumah tangga terpilih digunakan metode *Systematic Sampling*.

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutanlah yang menjadi responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

3.3 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang dipakai pada Survei Sosial Ekonomi 2010 yang ada kaitannya dengan penulisan adalah :

Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur dalam pengertian bahwa kebutuhan sehari-hari diurus bersama-sama menjadi satu.

Anggota Rumah Tangga

Anggota rumah tangga (art) adalah orang yang biasanya tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di dalam rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Orang yang berpergian walaupun kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah enam bulan atau lebih, tidak termasuk art. Orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau yang telah tinggal di dalam rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi berniat tinggal enam bulan atau lebih dianggap art.

Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan bukan/non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan untuk pesta dan upacara). Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Namun disadari, bahwa informasi pendapatan ini tidak seperti yang diharapkan, dimana banyak responden cenderung memberikan informasi pendapatan yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu, data pendapatan sendiri

diproksi dengan data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

3.4 Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan segera setelah pelaksanaan pencacahan rumah tangga selesai dilakukan. Secara umum tahap yang dilalui dalam proses ini meliputi: *Receiving, batching, editing, coding* dan *entri data*. Kegiatan *receiving* dan *batching* yaitu tahap penerimaan, pengecekan identitas, kelengkapan, penyusunan dan pengelompokan dokumen hasil pencacahan. Sedangkan *editing* dan *coding* meliputi tahap pemeriksaan isian dokumen dan pemberian kode. Selanjutnya dilakukan *entri data* yaitu tahap perekaman data secara komputerisasi dalam satu program pengolahan.

3.5 Teknis Analisis

Teori atau ukuran-ukuran yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia. Sedangkan untuk data pendapatan didekati dengan data pengeluaran (konsumsi) rumah tangga. Dengan pendekatan pengeluaran akan diperoleh informasi mengenai barang-barang yang telah dikonsumsi oleh responden selama seminggu yang lalu untuk makanan dan setahun yang lalu untuk non makanan.

Gini Ratio

Angka Gini Ratio terletak antara 0-1 dan apabila angka ini makin mendekati 0 (nol) berati semakin rendah tingkat ketimpangannya. Sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berati semakin tinggi tingkat ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar).

Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

0,00 < G < 0,35	-----> pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
0,35 < G < 0,50	-----> pemerataan / ketimpangan sedang
G > 0,50	-----> pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Kriteria Bank Dunia

Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok berpendapatan tinggi. Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil (decile) yaitu 40 persen pertama sama dengan decile ke-4; 40 persen kedua sama dengan decile ke-8 dan 20 persen terakhir adalah decile ke-10.

Dalam menentukan besarnya *decile* ke-i digunakan rumus :

$$D_i = Q_i + \frac{(n_i - P_i)}{(P_a - P_b)}(Q_a - Q_b)$$

i = 1,2,3,4,.....10

n_i = persentase ke-i

D_i = Decile ke-i

Q_b= Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i

Q_a= Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i

P_b= Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum D_i

P_a= Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah D_i

Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Jika bagian pendapatan yang diterima kelompok ini:

Kurang dari 12 persen	--->	pemerataan rendah / ketimpangan tinggi
12 persen – 17 persen	--->	pemerataan / ketimpangan sedang
Diatas 17 persen	--->	pemerataan tinggi / ketimpangan rendah

BAB IV
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

BAB IV
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

4.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Batang memiliki karakteristik dataran rendah dan dataran tinggi. Sebelah utara wilayahnya berbatasan dengan pantai dan sebelah selatan merupakan daerah perbukitan. Dengan luas wilayah 78.864,16 Ha sebagian besar (71,5%) merupakan lahan bukan sawah dan hanya 28,5% yang berupa lahan sawah.

Jenis tanah didominasi tanah latosol (69,7%) dan hanya 13,23% untuk jenis tanah andosol. Curah hujan berkisar 1.944 sampai 7.622 mm pada tahun 2010 yang berubah setiap setengah tahun. Sementara jumlah hari hujan berkisar antara 99 sampai 264 hari, Kecamatan Bawang tercatat sebagai daerah dengan hari hujan tertinggi.

Secara geografis Kabupaten Batang terletak antara $6^0$51'46" dan $7^0$11'47" Lintang Selatan dan antara $109^0$40'19" dan $110^0$03'06" Bujur Timur. Batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan. Sedangkan sebelah utara berbatasan langsung dengan laut jawa.

4.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) jumlah penduduk Kabupaten Batang tercatat 706.015 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 352.910 jiwa dan perempuan 353.105 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,66 persen per tahun. Jika dilihat sebarannya maka Kecamatan Batang dihuni 16,82% dari total penduduk Kabupaten Batang. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 895 jiwa/Km^2 dan Kecamatan Batang merupakan kecamatan terpadat

penduduknya. Sedangkan Kecamatan Blado merupakan kecamatan terkecil tingkat kepadatan penduduknya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 terdapat 36,59% penduduk Kabupaten Batang yang bekerja di sektor pertanian, 21,87% di sektor industri pengolahan, sektor perdagangan mencapai 19,54%, dan sisanya tersebar di sektor konstruksi, jasa-jasa dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2: Persentase Tenaga Kerja menurut Sektor di Kabupaten Batang, 2010

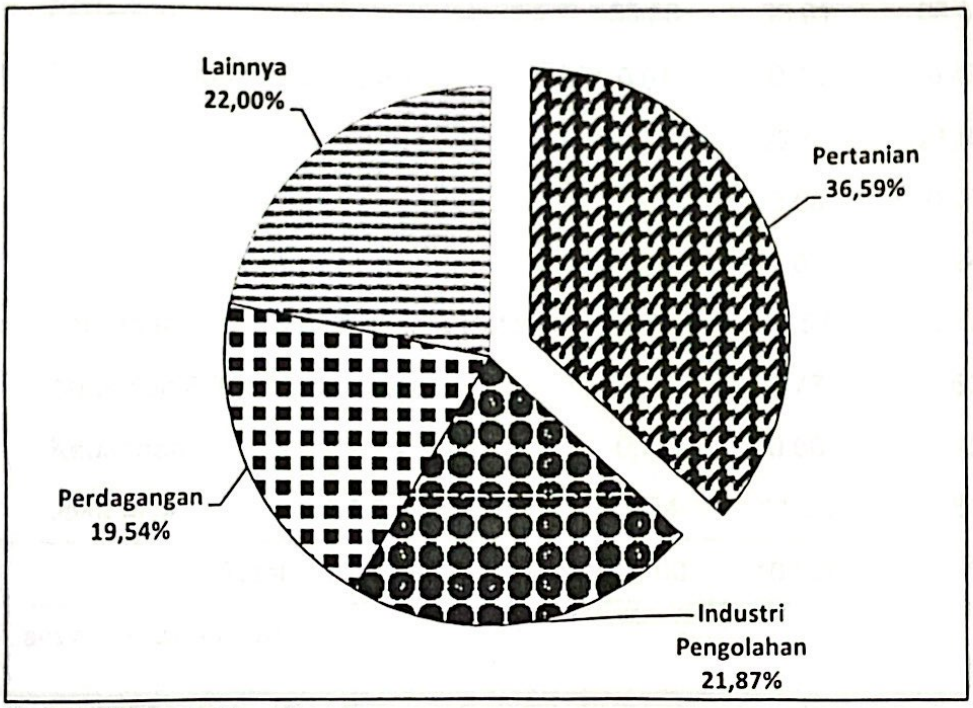

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Komposisi tenaga kerja ini tidak terlalu berubah selama tiga tahun terakhir. Namun persentase tenaga kerja pada sektor industri, transportasi dan jasa-jasa cenderung menurun. Sementara sektor pertanian terus menunjukkan kenaikan. Luas lahan pertanian yang semakin menyempit sementara tenaga kerja yang menggantungkan penghidupannya di sektor pertanian semakin meningkat jelas akan berpengaruh terhadap penghasilan rumah tangga pertanian. Menurut hasil

penelitian yang dilakukan BPS tahun 2007 tercatat bahwa penduduk miskin Kabupaten Batang 53,63 persen bekerja di sektor pertanian. Perkembangan tenaga kerja setiap sektor pada tahun 2008 sampai 2009 lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Tenaga Kerja menurut Sektor di Kabupaten Batang, 2008 - 2010

No.	Lapangan Usaha (Sektor)	Persentase Tenaga Kerja		
		2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	35,58	36,01	36,59
2	Pertambangan & Penggalian	0,61	0,43	0,45
3	Industri Pengolahan	24,41	22,63	21,87
4	Listrik, Gas & Air	0,07	0,08	0,07
5	Bangunan	5,95	7,07	7,24
6	Perdagangan, rumah makan & Hotel	18,01	17,57	19,54
7	Angkutan & Telekomunikasi	4,13	3,77	3,62
8	Keuangan	0,70	0,60	0,72
9	Jasa-jasa	10,54	11,83	9,89
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

4.3 Kondisi Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Batang sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Pada tahun 2010 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang tercatat Rp 5,27 Triliun, dimana sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sekitar 29,4 persen. Sektor industri berada pada posisi kedua dengan persentase kontribusi sebesar 25,12 persen dan berikutnya sektor perdagangan sebesar 15,85 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonominya mencapai 4,97 persen. Angka ini tercatat paling tinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan PDRB juga diikuti peningkatan pendapatan regional Kabupaten Batang.

Jika dilihat dari pergerakan inflasinya tercatat masih di bawah dua digit. Sampai akhir tahun 2010 inflasi yang terjadi di kabupaten Batang mencapai 6,62 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang mencapai 6,96 persen.

Guna menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Batang, pada akhir 2010 dibutuhkan dana sebesar Rp 614,5 Milyar. Sebagian besar anggaran yang dibutuhkan diperoleh dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp 598,9 Milyar. Sementara dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp 45,4 Milyar. Retribusi daerah mendukung 54,35 persen terhadap PAD atau sebesar Rp 24,6 Milyar. Sementara pajak daerah menyumbang Rp 10 Milyar atau 22,14 persen. Selama tahun 2010 PAD diperoleh dari 4 sumber yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah.

BAB V

SUMBER PENGHASILAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK

PERPUSTAKAAN KHUSUS SETWAN SEKRETARIAT DPRD KAB BATANG

BAB V
SUMBER PENGHASILAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK

5.1 Sumber Penghasilan Rumah Tangga

Pola konsumsi penduduk tentunya sangat bergantung dari penghasilan rumah tangganya. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga, semakin banyak kebutuhan yang akan mereka penuhi. Sementara faktor non ekonomi yang juga berperan terhadap pola konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Berubahnya kebiasaan dan tata nilai turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya.

Grafik 3: Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga menurut Sumber Penghasilan Utama di Kab. Batang, 2010

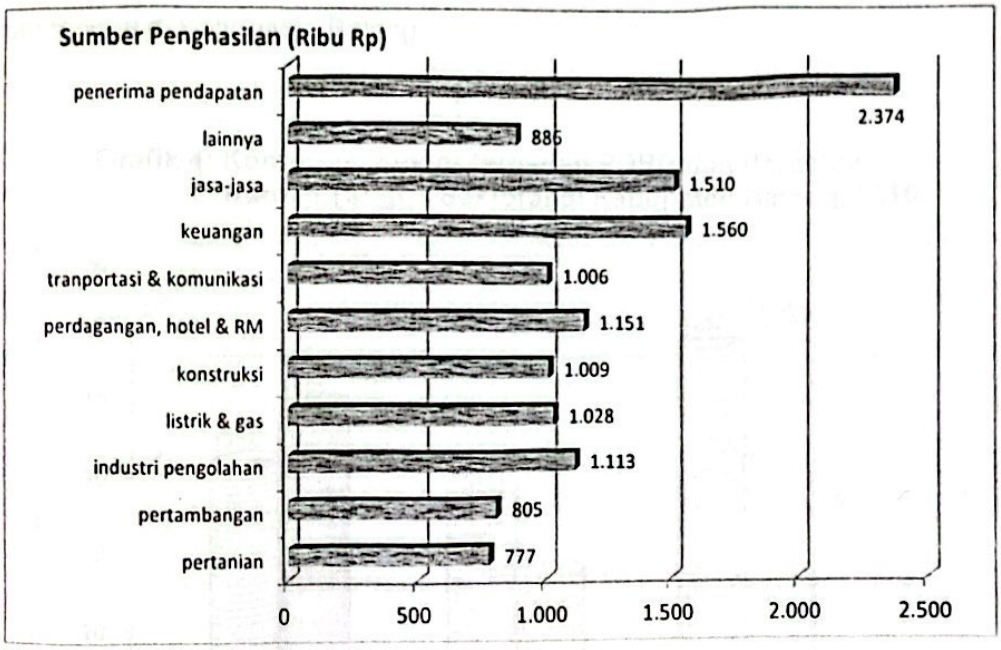

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Batang selama sebulan mecapai 1.107 ribu rupiah. Jika diamati pada grafik 3 tersebut akan terlihat bahwa rumah tangga dengan sumber penghasilan utama dari sektor pertanian menempati peringkat terbawah yaitu rata-rata 777 ribu rupiah. Sedangkan sektor keuangan menduduki peringkat teratas yaitu sekitar 1.560 ribu rupiah. Sektor lain yang cukup besar (diatas 1.500 ribu rupiah) adalah sektor jasa-jasa mencapai 1.510 ribu rupiah. Kelompok lain yaitu kelompok penerima pendapatan menunjukkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan sebesar 2.374 ribu rupiah.

Rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian mempunyai rata-rata pengeluaran paling kecil dibandingkan sektor lainnya. Padahal pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Batang. Ada sekitar 37,01 persen rumah tangga yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. Sedangkan rumah tangga yang bekerja di sektor jasa-jasa sebanyak 9,08 persen dengan tingkat pengeluaran 1.510 ribu rupiah. Hanya 0,83 persen rumah tangga di Kabupaten Batang yang bekerja di sektor keuangan dengan rata-rata pengeluaran sebulan 1.560 ribu rupiah. Walaupun kedua sektor tersebut mempunyai nilai rata-rata pengeluaran yang besar akan tetapi hanya dinikmati kurang dari 10 persen rumah tangga di Kabupaten Batang.

Grafik 4: Kontribusi Sektor terhadap PDRB dan Persentase Rumah Tangga Sektoral di Kabupaten Batang, 2010

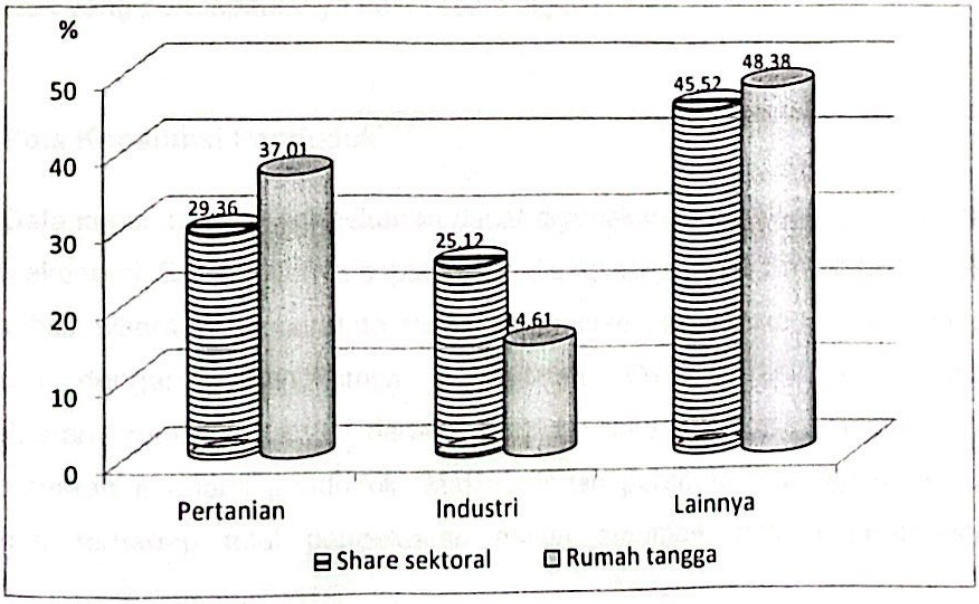

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Ditinjau dari sisi PDRB, akan terlihat seperti pada grafik 4 bahwa selama tahun 2010 sektor pertanian yang menyumbang 29,36 persen PDRB dan dinikmati oleh 37 persen rumah tangga. Sementara sektor industri yang berperan dalam pembentukan PDRB sebesar 25,12 persen dinikmati oleh 14,61 persen rumah tangga. Disini terlihat bahwa sektor pertanian yang mempunyai andil terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Batang, namun paling besar pula dalam menanggung rumah tangga di Kabupaten Batang.

5.2 Rata-rata Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan sebagai cerminan tingkat pendapatan per kapita sebulan. Pendekatan pengeluaran ini dipakai karena sulit dan kurang akuratnya data pendapatan. Rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi cenderung akan merendahkan nilai pendapatannya saat wawancara. Di sisi lain responden hanya melaporkan pendapatan utamanya saja sementara pendapatan tambahan sering terlewatkan.

Hasil Survei Sosial Ekonomi 2010 ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan di Kabupaten Batang adalah 297.426 rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 265.138 rupiah per kapita sebulan. Peningkatan pengeluaran ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan pokok penduduk atau karena ada penduduk yang pendapatannya naik secara signifikan.

5.3 Pola Konsumsi Penduduk

Data konsumsi dan pengeluaran dapat digunakan untuk penelitian penerapan hukum ekonomi. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ernest Engel (1995), bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian

penduduk. Menurut Engel bila persentase makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80 persen maka tingkat kesejahteraan sangat rendah.

Perubahan perilaku konsumsi penduduk dalam hal ini rumah tangga merupakan aspek yang dapat dijadikan indikator perubahan kemampuan ruamah tangga tersebut untuk memenuhi perubahan pendapatan. Perubahan konsumsi dari makanan ke non makanan erat kaitannya dengan perubahan status kehidupan rumah tangga.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran pendapatan digunakan oleh penduduk Kabupaten Batang untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5: Persentase Penggunaan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Batang, 2009-2010

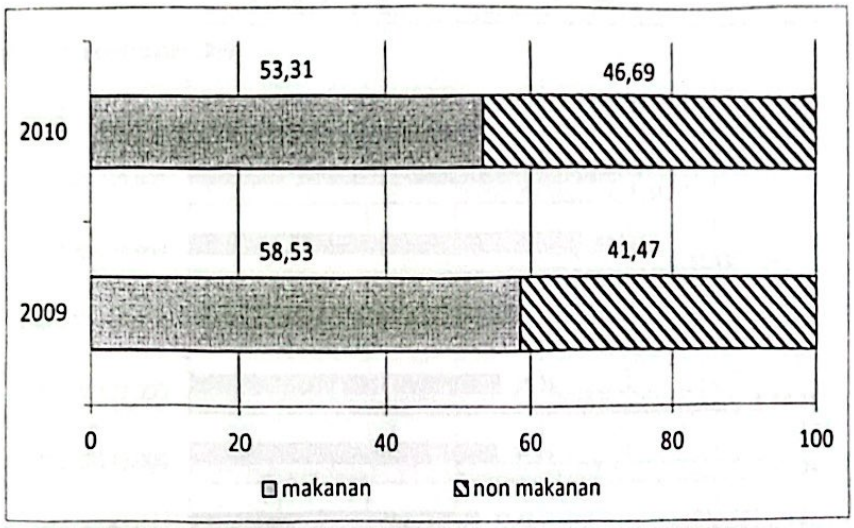

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2010 sebanyak 53,31 persen pengeluaran penduduk di Kabupaten Batang digunakan untuk kebutuhan makanan. Sedangkan sisanya 46,69 persen dikeluarkan untuk kebutuhan non makanan. Persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan selama dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Baik pada tahun 2009 maupun 2010 persentase pengeluaran untuk makanan kurang dari 60 persen, terlihat ada penurunan konsumsi makanan yang merefleksikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang.

Kebutuhan makanan memang merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ini akan lebih besar. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang tinggi maka pengeluran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan seseorang, pengeluaran untuk bukan makanan semakin besar. Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari distribusi pengeluaran menurut kelompok pendapatan. Bagi penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi umumnya persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin rendah dan sebaliknya kebutuhan untuk non makanan semakin tinggi.

Grafik 6: Persentase Konsumsi Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Batang, 2010

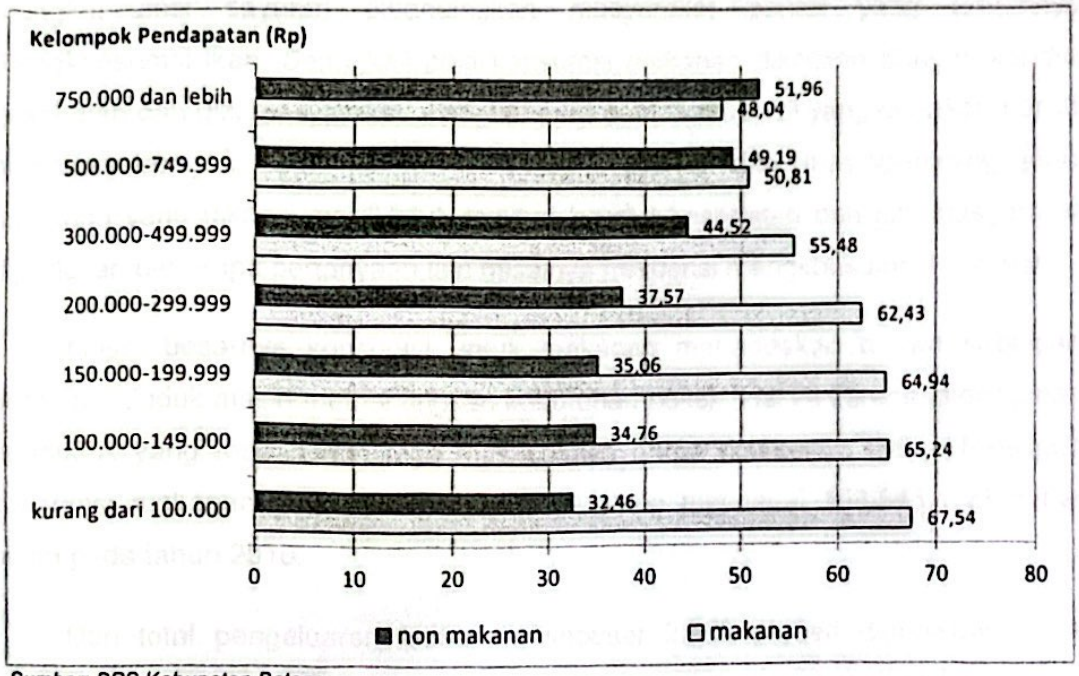

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Dari grafik 6 tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Batang semakin tinggi kelompok pendapatan penduduk maka konsumsi untuk non makanan semakin meningkat. Pada kelompok pendapatan kurang dari 100.000 rupiah sebanyak 67,54 persen pendapatan digunakan untuk pemenuhan konsumsi makanan dan sisanya 32,46 persen digunakan untuk konsumsi non makanan. Kemudian pada kelompok

pendapatan 100.000 - 149.000 rupiah konsumsi makanan sebesar 65,24 persen dan sisanya 34,76 persen untuk konsumsi non makanan. Hal ini mengalami pergeseran seiring meningkatnya pendapatan seseorang.

Semakin menurunnya konsumsi makanan akan meningkatkan konsumsi non makanan. Hal ini terlihat jelas pada kelompok pendapatan 750.000 rupiah keatas. Dimana pada kelompok pendapatan tersebut pengeluaran untuk konsumsi non makanan lebih besar mencapai 51,96 persen daripada konsumsi makanan yang hanya 48,04 persen.

5.3.1 Pola Konsumsi Makanan

Pola konsumsi makanan penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Misalnya masyarakat di daerah pegunungan cenderung lebih banyak mengkonsumsi sayuran dibandingkan masyarakat pantai yang umumnya mengkonsumsi ikan. Seringkali pola konsumsi makanan dikaitkan dengan kondisi kesehatan dan gizi masyarakat. Padahal data-data dari survei yang disajikan hanya berkaitan dengan pola makanan berupa kuantitas dari masing-masing jenis makanan yang dikonsumsi. Untuk melihat kondisi kesehatan dan gizi masyarakat diperlukan beberapa pertanyaan lain misalnya frekuensi mengkonsumsi makanan.

Masih besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok. Hal ini karena pendapatan penduduk yang rendah dan juga melonjaknya harga kebutuhan hidup. Rata-rata konsumsi makanan penduduk Kabupaten Batang mencapai 158.543 rupiah per bulan pada tahun 2010.

Dari total pengeluaran makanan, sebesar 22,59 persen digunakan untuk konsumsi padi-padian. Pengeluaran konsumsi makanan yang relatif besar lainnya adalah konsumsi makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih masing-masing sebesar 26,65 persen dan 10,66 persen. Besarnya konsumsi makanan dan minuman jadi menunjukkan gaya hidup masyarakat Kabupaten Batang yang lebih memilih membeli makanan dan minuman jadi.

Selain itu pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih relatif masih cukup besar merefleksikan cukup banyak penduduk yang merokok di Kabupaten Batang. Sedangkan pengeluaran konsumsi makanan yang paling kecil adalah konsumsi umbi-umbian yaitu 0,30 persen. Kecilnya konsumsi umbi-umbian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Batang lebih memilih mengkonsumsi padi-padian sebagai sumber makanan pokoknya.

Sedangkan konsumsi ikan relatif rendah sekitar 4,27 persen, padahal Kabupaten Batang merupakan daerah pantai yang menghasilkan ikan laut beraneka ragam. Rendahnya konsumsi ikan sangat terkait dengan kurangnya informasi tentang manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan dan adanya budaya dan mitos negatif berkenaan makan ikan. Selain itu konsumsi daging juga masih sangat rendah, hanya 2,41 persen. Rendahnya konsumsi daging ini menunjukkan daya beli masyarakat yang masih rendah, dikarenakan harga daging yang relatif mahal. Demikian juga untuk konsumsi buah-buahan hanya 2,56 persen. Gambaran lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7: Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Batang, 2010

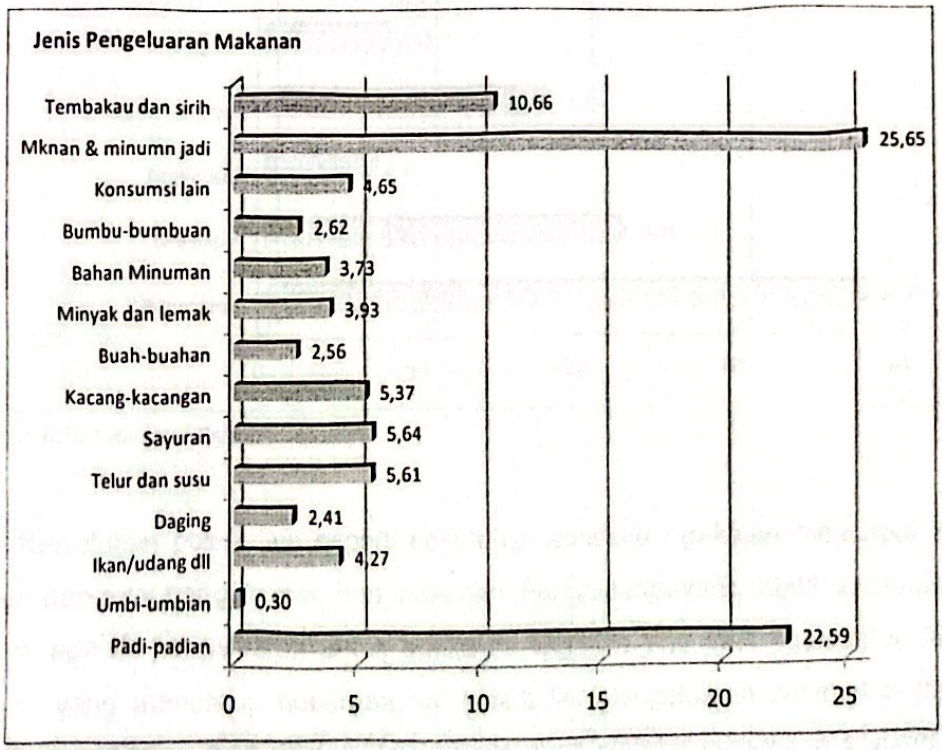

Sumber: BPS Kabupaten Batang

5.3.2 Pola Konsumsi Non Makanan

Semakin tinggi pendapatan maka relatif semakin tinggi pengeluaran penduduk untuk kebutuhan non makanan. Hal ini terjadi pada masyarakat modern yang kebutuhan sekunder bahkan tersier sudah mulai terpenuhi. Rata-rata pengeluaran untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Batang selama sebulan sebesar 138,88 ribu rupiah atau 46,69 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumahtangga sebesar 37,55 persen. Besarnya pengeluaran untuk keperluan perumahan dapat dimaklumi karena pengeluaran ini merupakan salah satu kebutuhan pokok selain pangan dan sandang. Secara rinci dapat disimak melalui grafik di bawah ini.

Grafik 8: Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Penduduk Kabupaten Batang, 2010

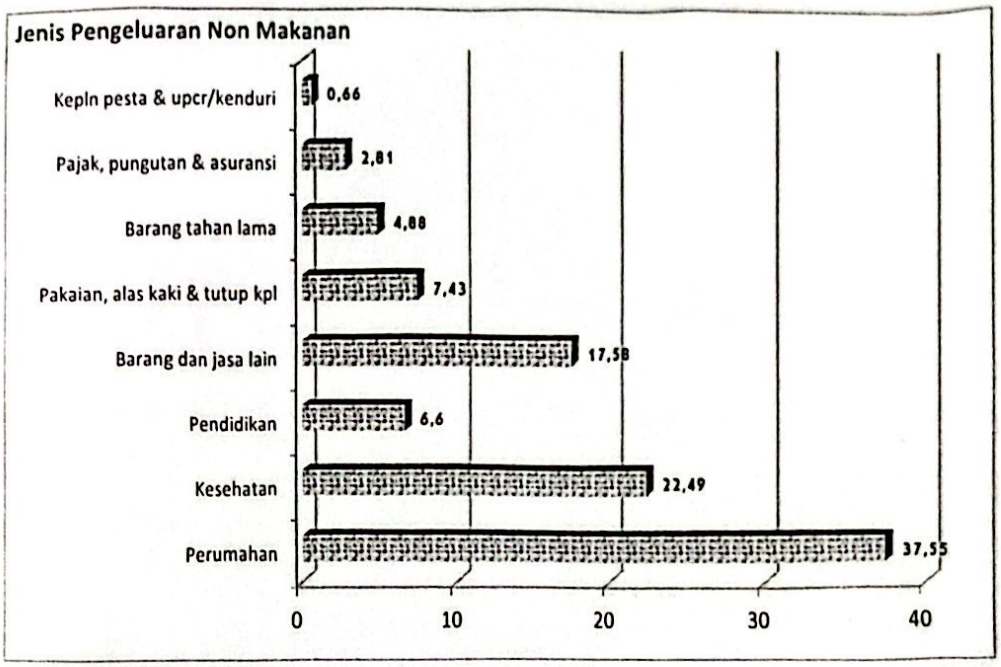

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Kebutuhan pokok lain seperti kebutuhan sandang / pakaian mencapai 7,43 persen dari total pengelularan non makanan. Pengeluaran yang relatif cukup besar lainnya adalah pengeluaran untuk aneka barang dan jasa yaitu mencapai 46,67 persen, yang mencakup beberapa hal antara lain pengeluaran kesehatan 22,49 persen, pendidikan 6,60 persen dan lainnya yang meliputi perawatan kecantikan,

transportasi dan jasa lainnya mencapai 17,58 persen. Besarnya pengeluaran untuk kesehatan yang mencapai 22,49 persen dikarenakan adanya bantuan dari pemerintah untuk pembiayaan kesehatan bagi warga miskin berupa jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan hanya 6,60 persen, angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 9,19 persen. Masih rendahnya pengeluaran untuk pendidikan ini terkait dengan kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anggota keluarganya. Menurut data Susenas 2009 angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun hanya mencapai 36,2 persen.

BAB VI
DISTRIBUSI PENDAPATAN

BAB VI
DISTRIBUSI PENDAPATAN

6.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata akan sulit menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang timpang hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan digunakan dua alat analisis yaitu Gini Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia. Uraian selengkapnya akan dibahas di bawah ini.

6.1.1. Berdasarkan Gini Ratio

Hasil penghitungan Gini Ratio Kabupaten Batang tercatat sebesar 0,28 yang berarti tingkat ketimpangan rendah. Gambaran ini mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam. Kondisi ini lebih baik bila dibandingkan Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,29.

Tabel 2: Nilai Gini Ratio dan Rata-rata Pengeluaran per kapita Kabupaten Batang, 2009-2010

Nilai	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Gini Ratio	0,27	0,28
Rata-rata pengeluaran per kapita (Rp)	265.138	297.426

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Meskipun tingkat ketimpangan masih tergolong rendah akan tetapi ada kecenderungan melebar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 tersebut, angka Gini Ratio tahun 2010 yang lebih tinggi dari tahun 2009. Jika pada tahun sebelumnya Gini Ratio Kabupaten Batang sebesar 0,27 namun tahun 2010 naik menjadi 0,28. Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Batang selama 2009-2010, nampak ada kenaikan dari 265.138 rupiah menjadi 297.426 rupiah. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada suatu kelompok masyarakat tertentu.

6.1.2. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Ketidak-merataan pendapatan juga dapat dilihat berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, khususnya pada kelompok penduduk yang berpendapatan rendah. Seperti halnya Gini Ratio, berdasarkan Kriteria Bank Dunia tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Batang menunjukkan hasil yang sejalan. Dari hasil penghitungan dengan Kriteria Bank Dunia *(Tabel 3)* menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah (golongan I) di Kabupaten Batang ternyata telah menerima 24,74 persen dari total pendapatan. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 24,15 persen. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Batang mempunyai ketimpangan yang rendah, atau tingkat pemerataan yang relatif baik. Sedangkan untuk 40 persen penduduk berpendapatan menengah (golongan II) pada tahun 2010 menikmati 36,90 persen dari total pendapatan, menurun dari tahun sebelumnya 38,36 persen.

Tabel 3: Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Batang, 2009-2010

Golongan Pendapatan	Pendapatan Regional *(%)*	
	2009	2010
(1)	(2)	(3)
40% I (rendah)	24,15	24,74
40% II (menengah)	38,36	36,90
20% III (tinggi)	37,49	38,36

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Kondisi kurang baik terjadi pada golongan III yang hanya terdiri dari 20 persen tetapi menikmati 38,36 persen dari total pendapatan. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2009 justru terjadi peningkatan. Pada tahun tersebut 20 persen penduduk hanya menikmati 37,49 persen dari total pendapatan.

6.1.3. Ketimpangan antara Perkotaan dan Perdesaan

Pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antar kawasan, antar kota kecamatan dan antar kelompok. Kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan ekonomi di daerah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di daerah perdesaan. Akibatnya, peran daerah perkotaan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan (*trickling down effects*) justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan (*backwash effects*).

Untuk melihat adanya ketimpangan antar daerah di Kabupaten Batang bisa dilihat dari tabel 4. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa berdasarkan penghitungan Gini Ratio maupun Kriteria Bank Dunia menunjukkan adanya perbedaan ketimpangan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Menurut penghitungan Gini Ratio ketimpangan di daerah perkotaan sebesar 0,25 lebih besar bila dibandingkan daerah perdesaan yang hanya 0,24.

Demikian pula menurut Kriteria Bank Dunia, di daerah perkotaan sebagian besar persentase pendapatan yaitu 47,48 persen dinikmati oleh 20 persen penduduk golongan III (kelompok kaya). Sementara 18,16 persen pendapatan harus dinikmati oleh 40 persen penduduk golongan I (kelompok kurang beruntung). Sedangkan di daerah perdesaan sebagian besar persentase pendapatan yaitu

40,82 persen dinikmati oleh 40 persen penduduk golongan II (kelompok menengah). Kelompok kurang beruntung (40 persen golongan I) di perdesaan menikmati 22,40 persen dari total pendapatan, lebih besar bila dibandingkan kelompok kurang beruntung di daerah perkotaan.

Tabel 4: Nilai Ketimpangan Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia menurut Status Daerah di Kabupaten Batang, 2010

Nilai	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)
Gini Ratio	0,25	0,24
Kriteria Bank Dunia :		
40% I (rendah)	18,46	22,40
40% II (menengah)	34,06	40,82
20% III (tinggi)	47,48	36,78

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Hasil penghitungan Gini Ratio maupun Kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah perdesaan relatif lebih kecil bila dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh struktur masyarakat desa yang lebih homogen yaitu sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sedangkan di daerah perkotaan mempunyai struktur masyarakat yang lebih heterogen, biasanya bekerja di berbagai sektor ekonomi yaitu sektor industri, perdagangan, jasa dan keuangan.

6.2. Perkembangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio)

Sejak tahun 2004 perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Batang cukup berfluktuatif. Pada tahun 2007 terjadi penurunan angka Gini Ratio yang cukup signifikan disebabkan adanya krisis keuangan global. Adanya krisis tersebut menyebabkan turunnya tingkat ketimpangan karena penduduk berpendapatan tinggi cenderung menurun pendapatannya. Hal ini menyebabkan turunnya rata-rata

pendapatan penduduk pada tahun tersebut. Perkembangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Batang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 9: Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, 2004 - 2010

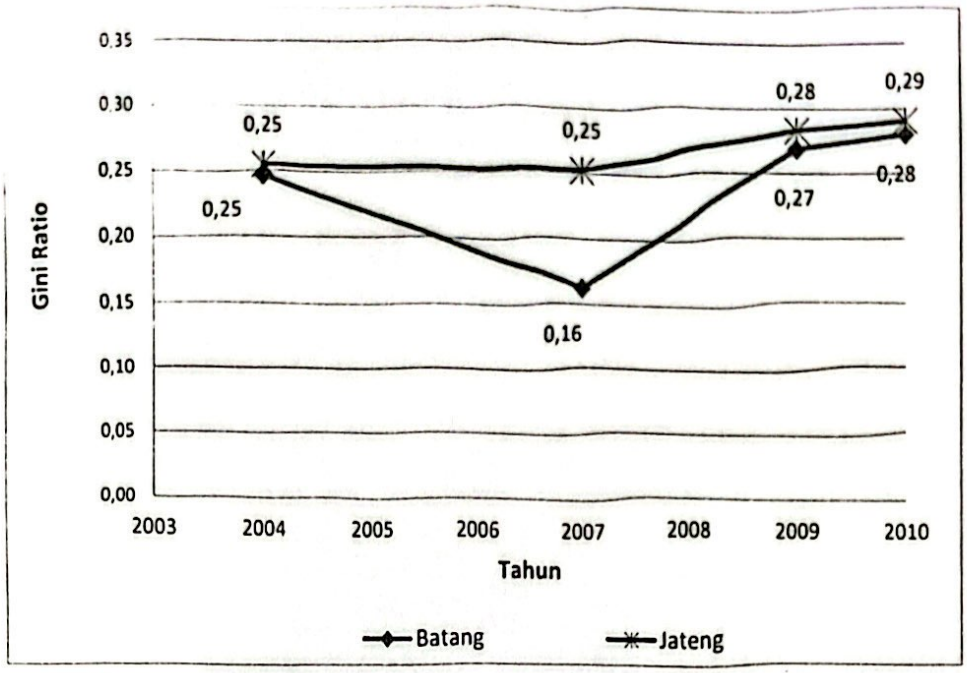

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Selama kurun waktu 2004 - 2010 distribusi pendapatan di Kabupaten Batang tergolong merata (ketimpangan rendah ≤ 0,30). Walaupun demikian perkembangan Gini Ratio tersebut mempunyai kecenderungan naik, artinya ketidak-merataan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Demikian juga pada perkembangan Gini Ratio di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan pendapatan di masyarakat yang semakin melebar.

BAB VII
PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian-uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2010 mencapai 297,42 ribu rupiah sebulan, yang digunakan untuk konsumsi makanan sebesar 53,31 persen (158,54 ribu rupiah) dan non makanan sebesar 46,69 persen (138,88 ribu rupiah). Bila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita tahun sebelumnya yang hanya 265,14 ribu rupiah nampak ada peningkatan.

2. Pengeluaran makanan tercatat sebesar 22,59 persen dipakai untuk konsumsi padi-padian dan pengeluaran makanan serta minuman jadi tercatat sebesar 26,65 persen.

3. Sementara untuk keseluruhan pengeluaran non makanan, sebesar 37,55 persen digunakan untuk kebutuhan perumahan. Hanya 6,60 persen digunakan untuk pendidikan dan 22,49 persen digunakan untuk kesehatan.

4. Distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Batang tahun 2010 berdasarkan Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia tergolong rendah. Tercatat bahwa Gini Ratio Kabupaten Batang tahun 2010 sebesar 0,28 dan sebanyak 24,73 persen pendapatan regional dinikmati oleh 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penghitungan Gini Ratio ketimpangan di daerah perkotaan yaitu sebesar 0,25 lebih besar bila dibandingkan daerah pedesaan yang hanya 0,24. Kemudian menurut Kriteria Bank Dunia kelompok kurang beruntung (40 persen golongan I) di pedesaan menikmati 22,40 persen dari total pendapatan, lebih besar bila dibandingkan kelompok kurang beruntung di daerah perkotaan (18,16 persen). Hal ini menunjukkan

bahwa dari penghitungan Gini Ratio maupun Kriteria Bank Dunia di daerah pedesaan ketimpangan pendapatannya relatif lebih kecil bila dibandingkan daerah perkotaan.

6. Selama kurun waktu 2004-2010 Gini Ratio di Kabupaten Batang mempunyai kecenderungan meningkat artinya ketimpangan pendapatan relatif semakin melebar.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (2010), *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Asian Development Bank (ADB). (1999). *Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy*, Manila: Asian Development Bank.

Badan Pusat Statistik (2007), *Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang Dalam Angka*, berbagai terbitan, BPS, Batang.

Badan Pusat Statistik, (2008), *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 1: Provinsi*, beberapa terbitan, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 2: Kabupaten*, beberapa terbitan, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Jawa Tengah dalam Angka*, beberapa terbitan, BPS, Semarang.

Baltagi, B., H. (2005), *Econometrics Analysis of Panel Data, Third Edition*, John Willey and Sons, England.

Bappenas dan United Nations, (2007), *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*, Jakarta: Bappenas.

Barro, R. J. (2000), 'Inequality and Growth in a Panel of Countries', *Journal of Economic Growth*, Vol. 5, No. 1.

Benabou, R. (1996), 'Inequality and Growth', *NBER Macroeconomics Annual*.

Benhabib, J. and A. Rustichini. (1996), 'Social Conflict and Growth', *Journal of Economic Growth*, Vol. 1, No. 1.

Bertola, G. (1993), 'Market Structure and Income Distribution in Endogenous Growth Models', *American Economic Review*, Vol. 83.

Blejer, M. I. and I. Guerrero. (1990), 'The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of Philippines', *Review of Economics and Statistics*, Vol. 72.

Bourgignon, F. and C. Morrisson (1998), 'Inequality and Development: The Role of Dualism', *Journal of Development Economics*, Vol. 57.

Deininger, K. and L. Squire (1998), 'New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth', *Journal of Development Economics*, Vol. 57.

Feenberg, D. and J. Poterba (1993), 'Income Inequality and the Incomes of Very High Income Tax Payers: Evidence from Tax Returns', *Tax Policy and the Economy*, Vol. 7.

Fosu, A.,K. (2009), "Inequality and the Impact of Growth on Poverty: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa", BWPI Working Paper, 98.

Galor, O. and J. Zeira (1993), 'Income Distribution and Macroeconomics' *Review of Economic Studies*, Vol. 60.

Gini, Corrado (1921), "Measurement of Inequality and Incomes". *The Economic Journal* 31. (http://en.wikipedia.org)

Gujarati, DN., (2004), *Basic Econometrics, Fourth Edition*, The McGraw-Hill Companies, New York.

Hajiji, A., (2010), "Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau, 2002-2008" diakses dari *http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/ 40851/2010aha2.pdf? sequence=11.*

Hidayat, S., dan Patunru, AA. (2007), Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan: Estimasi Parameter Elastisitas Kemiskinan Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 1996-2005. Jakarta: Universitas Indonesia.

Jamal, H. (2006), "Does Inequality Matter for Poverty Reduction? Evidence from Pakistan's Poverty Trends". *The Pakistan Development Review 45: 3*, pp. 439–459.

Kuncoro, Mudrajad (2003), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Li, H., L. C. Xu and H. Zou (2000), 'Corruption, Income Distribution, and Growth', *Economics and Politics*, Vol. 12, No. 2, pp. 155–82.

Malinen, T. (2007), "A Comment on The Relationship Between Inequality and Growth", *Discussion Paper No. 632.*

Meier, Gerald M. and James E. Rauch (2000), *Leading Issues in Economic Development*, Seventh Edition, Oxford University Press, New York.

Mocan, H. N. (1999). 'Structural Unemployment, Cyclical Unemployment, and Income Inequality'. *Review of Economics and Statistics*, Vol. 81, No. 1.

Mohtadi, H. (1988), 'Growth-distribution Trade-offs: The Role of Capacity Utilization', *Cambridge Journal of Economics*.

Perotti, R. (1996), 'Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say', *Journal of Economic Growth*, Vol. 1, No. 2.

Ravallion, M. (2005), A poverty-inequality trade-off, *Journal of Economic Inequality* 3: 169-181.

Suroso, Agus dkk. (2005), *Perhitungan Indeks Rasio Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2005*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman.

Tambunan, Tulus T.H. (2001), *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Todaro, M.P., dan Smith, S.C. (2006), *Pembangunan Ekonomi (Alih Bahasa Indeonesia)*. Edisi Kesembilan Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Widarjono, A. (2007), *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, FE UII, Yogyakarta.

Widodo, S.T. (1990), *Indikator Ekonomi: Dasar Penghitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Widodo, T. (2006), *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran Penduduk dan Persentase Pengeluaran Makanan / Non Makanan menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Batang, 2010

Kelompok Pendapatan *(Rupiah / Bulan)*	Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan *(Rupiah)*	Persentase Pengeluaran	
		Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kurang dari 100.000	89.353	67,54	32,46
100.000 – 149.999	131.838	65,24	34,76
150.000 – 199.999	176.730	64,94	35,06
200.000 – 299.999	245.292	62,43	37,57
300.000 – 499.999	372.941	55,48	44,52
500.000 – 749.999	581.500	50,81	49,19
750.000 dan lebih	852.829	48,04	51,96
Kab. Batang Tahun 2010	297.426	53,31	46,69
Tahun 2009	265.138	58,53	41,47

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Tabel 2. Pola Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Batang, 2009 – 2010 *(Persen)*

No	Komoditas Makanan	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padi-padian	21,99	22,59
2.	Umbi-umbian	0,40	0,30
3.	Ikan / udang / cumi / kerang	4,68	4,27
4.	Daging	3,35	2,41
5.	Telur dan susu	5,56	5,61
6.	Sayur-sayuran	5,05	5,64
7.	Kacang-kacangan	5,43	5,37
8.	Buah-buahan	4,14	2,56
9.	Minyak dan lemak	3,80	3,93
10.	Bahan minuman	4,24	3,73
11.	Bumbu-bumbuan	2,45	2,62
12.	Konsumsi Lainnya	3,86	4,65
13.	Makanan dan Minuman Jadi	21,30	25,65
14.	Tembakau dan sirih	13,75	10,66
	Total	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Tabel 3. Pola Konsumsi Non Makanan Penduduk Kabupaten Batang, 2009 – 2010 *(Persen)*

No	Komoditas Non Makanan	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	46,72	37,55
2.	Aneka barang dan jasa:	29,89	46,67
	- *Kesehatan*	*3,99*	*22,49*
	- *Pendidikan*	*5,73*	*6,60*
	- *Lainnya*	*20,16*	*17,58*
3.	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	8,49	7,43
4.	Barang tahan lama	10,00	4,88
5.	Pajak, pungutan dan asuransi	3,11	2,81
6.	Keperluan pesta dan upacara lainnya	1,79	0,66
	Total	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Batang

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG

VSE. 2010

SURVEI SOSIAL EKONOMI 2010

KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT			
1	Provinsi		
2	Kabupaten/Kota *)		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan *)		
5	Klasifikasi desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	
6	a. Nomor blok sensus		
	b. Nomor sub blok sensus (nomor segmen)		
7	Nama kepala rumah tangga		
8	Alamat (nama jalan/gang, RT/RW/dusun)		
II. RINGKASAN			
1	Banyaknya anggota rumah tangga		
2	Banyaknya anggota rumah tangga umur 0 - 4 tahun		
3	Banyaknya anggota rumah tangga umur 5 tahun ke atas		
4	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas		

III. KETERANGAN PETUGAS					
1	Nama dan NIP pencacah:		5	Nama dan NIP pengawas :	
2	Jabatan pencacah: 1. Staf BPS 3. Mitra 2. KSK		6	Jabatan pengawas : 1. Staf BPS 3. Mitra 2. KSK	
3	Tanggal pencacahan:	Tanggal Bulan	7	Tanggal pengawasan :	Tanggal Bulan
4	Tanda tangan pencacah:		8	Tanda tangan pengawasan :	

*) Coret yang tidak perlu

2

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

No. urut	Nama anggota rumah tangga (Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini baik dewasa, anak-anak maupun bayi)	Hubungan dengan kepala rumah tangga (kode)	Art 0 - 6 tahun					
			Jenis kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Umur tahun	Status perkawinan (kode)	Apakah memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil? Boleh saya melihatnya? (kode)	Apakah pernah/ sedang mengikuti pendidikan pra sekolah? 1. Ya, pernah 2. Ya, sedang 3. Tidak	Jika kol (8) berkode 1 atau 2, jenis pendidikan pra sekolah (kode)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01		1						
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								

Kode Kolom 3
Hubungan dengan krt:

1. *Kepala rt*
2. *Istri/suami*
3. *Anak*
4. *Menantu*
5. *Cucu*
6. *Orang tua/mertua*
7. *Famili lain*
8. *Pembantu rt*
9. *Lainnya*

Kode Kolom 6
Status Perkawinan:

1. *Belum kawin*
2. *Kawin*
3. *Cerai hidup*
4. *Cerai mati*

Kode Kolom 7
Akte Kelahiran:

1. *Ya, dapat ditunjukkan*
2. *Ya, tidak dapat ditunjukkan*
3. *Tidak punya*
4. *Tidak tahu*

Kode Kolom 9
Pendidikan Pra Sekolah:

1. *TK/BA/RA*
2. *Kelompok Bermain*
3. *Taman Penitipan Anak*
4. *PAUD terintegrasi BKB/Posyandu*
5. *Lembaga lainnya*

1. SETIAP SELESAI MENCATAT SEMUA ART DI KOLOM (2) DAN KOLOM (3) TANYAKAN SEKALI LAGI APAKAH ADA ART LAIN SEPERTI PEMBANTU RUMAH TANGGA, SOPIR, TUKANG KEBUN, PENGASUH ANAK/ORANG TUA DAN YANG SEJENISNYA YANG TINGGAL BERSAMA DALAM RUMAH TERSEBUT. JIKA ADA, MASUKKAN DALAM DAFTAR.
2. TANYAKAN PULA APAKAH ADA NAMA-NAMA YANG TERLEWAT SEPERTI BAYI YANG BARU LAHIR DAN ART YANG SEMENTARA BEPERGIAN. JIKA ADA, MASUKKAN KE DALAM DAFTAR.
3. SEMENTARA ITU, UNTUK ART YANG BEPERGIAN KURANG DARI 6 BULAN TETAPI DENGAN TUJUAN PINDAH ATAU AKAN MENINGGALKAN RUMAH SELAMA 6 BULAN ATAU LEBIH TIDAK DIANGGAP SEBAGAI ART. KELUARKAN DARI DALAM DAFTAR.
4. URUTKAN KEMBALI KE NOMOR URUT YANG ADA DI KOLOM (1)

3

V. KETERANGAN PERORANGAN TENTANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN, SERTA FERTILITAS DAN KB

Nama: ..... No. urut .....

No. urut ibu kandung: .....
[Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rt ini]

Nama & nomor urut art pemberi informasi:
.....

V.A. KETERANGAN KESEHATAN (UNTUK SEMUA UMUR)

1. Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan *seperti di bawah ini*? **(Bacakan dari a s.d. h)**
[Isikan kode 1 bila ada, kode 2 bila tidak ada]

a. Panas	e. Diare/buang² air
b. Batuk	f. Sakit kepala berulang
c. Pilek	g. Sakit gigi
d. Asma/napas sesak/cepat	h. Lainnya*)

[Jika semua R.1 = 2, lanjutkan ke R.7]

2. Kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari?
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.4]**

3. Lamanya terganggu: ..... hari

4. Apakah pernah mengobati sendiri dalam 1 bulan terakhir?
1. Ya 2. Tidak

5. Apakah pernah berobat jalan dlm 1 bulan terakhir?
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.7]**

6. Berapa kali berobat jalan selama 1 bulan terakhir:
[Isikan frekuensi berobat jalan untuk setiap fasilitas]

a. RS pemerintah	e. Praktek nakes
b. RS swasta	f. Praktek batra
c. Praktek dokter/poliklinik	g. Dukun bersalin
d. Puskesmas/Pustu	h. Lainnya

7. Apakah pernah rawat inap dalam 1 tahun terakhir?
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.9.a]**

8. Lamanya hari rawat inap (dalam hari)

a. RS Pemerintah	d. Praktek nakes
b. RS Swasta	e. Praktek batra
c. Puskesmas	f. Lainnya

V.B. KESEHATAN BALITA (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)

9. a. Umur dalam bulan: ..... *bulan*
(ke R.10 bila isian ≠ 00)

b. Jika R.9.a = 00, umur dalam hari: ..... *hari*

10. Siapa yang menolong proses kelahiran?
[Isikan kode jawaban langsung ke kotak]

1. Dokter	*4. Dukun bersalin*
2. Bidan	*5. Famili/keluarga*
3. Tenaga paramedis lain	*6. Lainnya*

11. Berapa kali sudah mendapat imunisasi?
[Isikan 0, bila belum pernah diimunisasi]

a. BCG	d. Campak-M...
b. DPT	e. Hepatitis B
c. Polio	

12. a. Apakah pernah diberi Air Susu Ibu (ASI)?
1. Ya 2. Tidak ➡ **[Art lain]**

b. Jika "Ya" **(R.12.a=1)**, lama pemberian ASI:
[Isikan dalam hari bila umur < 1 bulan dan dalam bulan bila umur ≥ 1 bulan]:

1. Lama pemberian ASI: .....
2. ASI saja: 2
3. ASI dengan makanan pendamping: 3

V.C. KETERANGAN PENDIDIKAN (UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS)

13. Partisipasi bersekolah:
1. Tidak/belum pernah bersekolah ➡ **(R.15)**
2. Masih bersekolah ➡ **[R.16]**
3. Tidak bersekolah lagi

14. Kapan berhenti bersekolah?
[Isikan '00' pada bulan dan '9999' pada tahun bila berhenti sebelum tahun 2000]

Bulan: ..... Tahun: .....

15. Alasan tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi:

01. Tidak ada biaya	*07. Cacat*
02. Bekerja/mencari nafkah	*08. Menunggu pengumuman*
03. Menikah/mengurus rt	*09. Belum cukup umur*
04. Tidak diterima	*10. Lainnya*
05. Sekolah jauh	
06. Merasa pendidikan cukup	

[Jika R.13 = 1, lanjutkan ke R.20]

16. Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang didudukki

01. Sekolah Dasar	*07. SMK*
02. Madrasah Ibtidaiyah	*08. Program D1/D2*
03. SMP Umum/Kejuruan	*09. Program D3*
04. Madrasah Tsanawiyah	*10. Program D4/S1*
05. SMA	*11. Program S2/S3*
06. Madrasah Aliyah	

17. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki
1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)

18. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki:

01. Tidak punya ijazah SD	*07. Madrasah Aliyah*
02. Sekolah Dasar	*08. SMK*
03. Madrasah Ibtidaiyah	*09. D1/D2*
04. SMP Umum/Kejuruan	*10. D3/Sarjana Muda*
05. Madrasah Tsanawiyah	*11. D4/S1*
06. SMA	*12. S2/S3*

*) Misalnya: Campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, kejang-kejang, tumpuh, pilek, kecelakaan, dll.

4

19. Jika R.13 = 3 dan R.18 < 6, apakah sedang mengikuti Program Paket A, B atau C?
1. Ya, Paket A 3. Ya, Paket C
2. Ya, Paket B 4. Tidak

20. Dapat membaca dan menulis:
1. Huruf latin 3. Huruf latin & huruf lainnya
2. Huruf lainnya 4. Tidak dapat

V.D. KETENAGAKERJAAN (UNTUK ART BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS)

21. a. Apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini selama seminggu terakhir?

1. Bekerja	1. Ya	2. Tidak	1
2. Sekolah	1. Ya	2. Tidak	2
3. Mengurus rt	1. Ya	2. Tidak	3
4. Lainnya selain kegiatan pribadi *)	1. Ya	2. Tidak	4

[Jika R.21.a.1 s.d. 4 = 2, lanjutkan ke R.22]

b. Dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yg menyatakan "Ya", kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu terakhir?
1 2 3 4
[Jika R.21.a.1 = 1, lanjutkan ke R.23]

22. Apakah mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tdk bekerja selama seminggu terakhir?
1. Ya 2. Tidak

23. Apakah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha selama seminggu terakhir?
1. Ya 2. Tidak

HANYA UNTUK ART YANG BEKERJA (Jika R.21.a.1=1 atau R.22=1)

24. Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu terakhir:
01. Pertanian, perburuan, dan kehutanan
02. Pertambangan dan penggalian
03. Perikanan
04. Industri pengolahan
05. Listrik, gas, dan air
06. Konstruksi
07. Perdagangan besar dan eceran
08. Penyediaan akomodasi & makan minum
09. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
10. Perantara keuangan
11. Real estate, usaha persewaan dan jasa perus.
12. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
13. Jasa pendidikan
14. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15. Jasa kemasy. sosial, budaya, dan perorangan
16. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17. Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18. Lainnya

25. Status kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu terakhir:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar → [Blok V.E]
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar → [Blok V.E]
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja tidak dibayar → [Blok V.E]
6. Lainnya

26. Berapa penghasilan bersih (uang dan barang) yang biasanya diterima selama sebulan dari pekerjaan utama?

Rp .....

V.E. FERTILITAS & KELUARGA BERENCANA (UNTUK WANITA BERUMUR 10TAHUN KE ATAS)

WANITA BERSTATUS KAWIN, CERAI HIDUP, CERAI MATI (Blok IV, Kolom 4 = 2 & Kolom 6 = 2,3, atau 4)

27. Umur pada saat perkawinan pertama ..... tahun

28. Jumlah tahun dlm ikatan perkawinan: ..... tahun

29. Jumlah anak kandung (a.k.) yang dilahirkan:	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
a. A.k. lahir hidup			
b. A.k. masih hidup			
c. A.k. sudah meninggal			

30. Penggunaan/pemakaian alat/cara KB:
1. Sedang menggunakan
2. Tidak menggunakan lagi → [Art lain]
3. Tidak pernah menggunakan → [Art lain]

31. Jika sedang menggunakan (R.30=1), alat/cara KB yang sedang digunakan/dipakai:
1. MOW/tubektomi
2. MOP/vasektomi
3. AKDR/IUD/spiral
4. Suntikan KB
5. Susuk KB/norplan/implenon/alwalit
6. Pil KB
7. Kondom/karet KB
8. Intraveg/tisue/kondom wanita
9. Cara tradisional

*) Yang termasuk kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, misal: olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).

5

VI. KETERANGAN PERUMAHAN

1 Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 1 Milik sendiri 5 Dinas 2 Kontrak 6 Milik orang tua/ sanak saudara 3 Sewa 7 Lainnya 4 Bebas sewa	☐
2 Jenis atap terluas 1 Beton 5 Asbes 2 Genteng 6 Ijuk/ rumbia 3 Seng 7 Lainnya 4 Sirap	☐
3 Jenis dinding terluas 1 Tembok 3 Bambu 2 Kayu 4 Lainnya	☐
4 Jenis lantai terluas 1 Bukan tanah 2 Tanah	☐
5 Luas lantai m²	☐☐☐
6 a Sumber air minum 01 Air kemasan bermerk ➡[R.8] 02 Air isi ulang ➡[R.8] 03 Leding meteran ➡[R.7] 04 Leding eceran ➡[R.8] 05 Sumur bor/ pompa 06 Sumur terlindung 07 Sumur tak terlindung 08 Mata air terlindung 09 Mata air tak terlindung 10 Air sungai 11 Air hujan 12 Lainnya {R.7}	☐☐
b Jika R.6.a = 05 s.d. 09 (pompa/sumur/mata air) jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat 1 < 10 m 3 Tidak tahu 2 ≥ 10 m	☐
7 Jika R.6.a = 03, 05 s.d. 12 penggunaan fasilitas air minum 1 Sendiri 3 Umum 2 Bersama 4 Tidak ada	☐
8 Cara memperoleh air minum 1 Membeli 2 Tidak membeli	☐
9 a Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 1 Sendiri 3 Umum 2 Bersama 4 Tidak ada ➡[R.9.c]	☐
b Jenis kloset 1 Leher angsa 3 Cemplung/cubluk 2 Plengsengan 4 Tidak pakai	☐
c Tempat pembuangan akhir tinja 1 Tangki/SPAL 4 Lubang tanah 2 Kolam/sawah 5 Pantai/tanah lapang/kebun 3 Sungai/danau/laut 6 Lainnya	☐
10 a Sumber penerangan 1 Listrik PLN 4 Pelita/sentir/obor 2 Listrik non PLN 5 Lainnya 3 Petromak/aladin	☐
b Jika listrik PLN, daya terpasang 1 450 watt 4 2 200 watt 2 900 watt 5 > 2 200 watt 3 1 300 watt 6 Tanpa meteran	☐
11 Bahan bakar/energi utama untuk memasak 1 Listrik 3 Minyak Tanah 5 Kayu bakar 2 Gas elpiji 4 Arang briket 6 Lainnya	☐

VII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

VII.A. PENGELUARAN UNTUK MAKANAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR [BERASAL DARI PEMBELIAN, PRODUKSI SENDIRI, DAN PEMBERIAN]	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
1 **Padi-padian** a. Beras	
b. Lainnya (jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung, dll)	
2 **Umbi-umbian** (ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu,dll)	
3 **Ikan/udang/cumi/kerang** a. Segar/ basah	
b. Asin/diawetkan	
4 **Daging** (daging sapi/kerbau/kambing/domba/ babi/ayam, jeroan, hati, limpa, abon, dendeng, dll)	
5 **Telur dan susu** a. Telur ayam/ itik/ puyuh	
b. Susu murni, susu kental, susu bubuk, dll	
6 **Sayur-sayuran** (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll)	
7. **Kacang-kacangan** (kacang tanah/hijau/ kedele/ merah/ tunggak/mete, tahu, tempe, tauco, oncom, dll)	
8 **Buah-buahan** (jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya, dll)	
9 **Minyak dan lemak** (minyak kelapa/ goreng, kelapa, mentega, dll)	
10 **Bahan minuman** (gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll)	
11 **Bumbu-bumbuan** (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, vetsin, dll)	
12 **Konsumsi Lainnya** a. Mie instant, mie basah, bihun, makaroni, mie kering	
b. Lainnya (kerupuk, emping, dll)	
13 **Makanan dan minuman jadi** a. **Makanan jadi** (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, gado-gado, nasi rames, dll)	
b. **Minuman non alkohol** (*soft drink*, es sirop, limun, air mineral, dll)	
c. **Minuman mengandung alkohol** (bir, anggur, dan minuman keras lainnya)	
14 **Tembakau dan sirih** a. Rokok (rokok kretek, rokok putih, cerutu)	
b. Lainnya (sirih, pinang, tembakau dan lainnya)	
15 **Jumlah pengeluaran makanan** (Rincian 1 s.d 14)	

6

VII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA (LANJUTAN)		
VII.B. PENGELUARAN BUKAN MAKANAN (BERASAL DARI PEMBELIAN PRODUKSI SENDIRI DAN PEMBERIAN)	Sebulan Terakhir (Rp)	12 bulan Terakhir (Rp)
(1)	(2)	(3)
16. **Perumahan dan fasilitas rumah tangga** a. Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah, milik sendiri, bebas sewa, dinas dan lain-lain		
b. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan		
c. Rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll		
d. Rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel, internet, warnet, benda pos, dll		
17. **Aneka barang dan jasa** a. Sabun mandi/cuci, kosmetik, perawatan rambut muka, tisu, dll		
b. Biaya kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan dan lainnya)		
c. Biaya Pendidikan (uang pendaftaran, SPP, komite sekolah, uang pangkal/daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus dan lainnya)		
d. Transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas		
e. Jasa lainnya (gaji sopir, pembantu, rumah tangga, hotel, dll)		
18. **Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala** (pakaian jadi, bahan pakaian, sepatu, topi dan lainnya)		
19. **Barang tahan lama** (alat rumah tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan (elektronik), alat olahraga, perhiasan, kendaraan, payung, arloji, kamera, HP, pasang telepon, pasang listrik, barang elektronik dll.)		
20. **Pajak, pungutan, dan asuransi** a. Pajak (PBB, pajak kendaraan)		
b. Pungutan/retribusi		
c. Asuransi Kesehatan		
d. Lainnya (Asuransi lainnya, tilang, PPh, dll)		
21. **Keperluan pesta dan upacara/kenduri tidak termasuk makanan** (perkawinan, ulang tahun, khitanan, upacara keagamaan, upacara adat, dan lainnya).		
22. **Jumlah pengeluaran bukan makanan** (Rincian 16 s.d. Rincian 21)		
23. **Rata-rata pengeluaran makanan sebulan** (Rincian 15 x $\frac{30}{7}$)		
24. **Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan** ($\frac{\text{Rincian 22 Kolom 3}}{12}$)		
25. **Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan** (Rincian 23 + 24)		
26. **Sumber penghasilan terbesar rumah tangga** ***(pilih dari art dengan penghasilan terbesar)***: a. Lapangan Usaha *(Tulis selengkap-lengkapnya)* b. Status Pekerjaan: *0. Penerima pendapatan* *1. Buruh/karyawan* *2. Pengusaha*		[Diisi Pengawas] ☐☐ ☐

7

VIII. CATATAN